

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Atas penelitian yang dilakukan dapat diketahui terdapat perbedaan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang dapat dilihat melalui nilai kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi. Fluktuasi tersebut terjadi dengan nilai 17,89% untuk tahun 2019 lalu naik tahun 2020 19,07% dan turun untuk tahun 2021 menjadi 19,05% dengan kategori "Kurang". Upaya pengelolaan PAD masih dinilai kurang melihat tingkat kemandirian, karena besarnya PAD masih lebih kecil daripada pendapatan transfer.
2. Atas penelitian yang dilakukan dapat diketahui penduduk Kabupaten Bandung mempunyai tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda, hal ini terlihat dari adanya perubahan pada setiap jenjang kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki fasilitas kesehatan yang mengalami penurunan pada RS, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, sedangkan Apotek mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada segi kemiskinan, presentase penduduk miskin berhasil ditekan agar tidak menyebabkan presentase naik tinggi untuk tahun 2021. Pada segi ketenagakerjaan, TPAK yang naik sebesar

2,92% untuk tahun 2021 dan kenaikan tersebut lebih besar dari rata-rata kenaikan TPAK Kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. APM berhasil meningkat tahun 2021 pada jenjang SMP dan SMA, dan APM yang hampir menyentuh 100% untuk jenjang SD menggambarkan banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengalokasikan dana untuk program kesejahteraan masyarakat, yang meliputi: kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan pendidikan pada setiap dinas-dinas yang terkait. Dengan adanya pengalokasian tersebut dapat membawa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung menjadi lebih baik seperti yang ditunjukkan pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung tahun 2019-2021. Akan tetapi jika dilihat dari besarnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung untuk tahun 2019-2021 menunjukkan "Kurang", maka hal ini menggambarkan perubahan positif yang ada pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung masih bergantung pada pendapatan transfer.

B. Implikasi

Berikut ini pemahaman teoritis dan pihak-pihak praktis yang terlibat :

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini menambah wawasan tentang cara mengevaluasi otonomi keuangan pemerintah daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian dapat menjadi batu loncatan bagi penelitian tambahan oleh akademisi yang tertarik untuk mempelajari kemandirian keuangan daerah dan menciptakan indikator pengukuran yang lebih baik untuk digunakan dalam analisis tersebut.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi banyak orang, termasuk akademisi, masyarakat umum, dan pembuat kebijakan di tingkat daerah dan kota, khususnya di Pemerintah Kabupaten Bandung. Untuk merencanakan pembangunan, mengalokasikan sumber daya, dan membuat keputusan yang tepat bagi setiap daerah berdasarkan kondisi dan potensinya, diperlukan data tentang kemandirian keuangan daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

C. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini ialah:

1. Penelitian ini tidak memeriksa masyarakat umum untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka tentang dampaknya terhadap kesehatan publik, pendidikan, kemiskinan, dan kesempatan kerja.
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu unit analisis dalam mengukur kemandirian keuangan daerah dan kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat.

D. Rekomendasi Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Untuk mengetahui secara mendalam pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, peneliti selanjutnya dianjurkan untuk melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat atau pimpinan pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk pengumpulan data primer, disamping menggunakan sumber data sekunder.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis kemandirian keuangan daerah dengan unit analisis lebih dari satu Pemerintah Daerah, sehingga dapat dijadikan pembanding untuk hasil kemandirian keuangan daerah dan kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat.